

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian sebelumnya dengan topik serupa dapat digunakan sebagai landasan atau referensi yang dapat membantu kelancaran penelitian yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kasmiah pada tahun 2014 berjudul "Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi kasus di desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan)." Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mantang Besar. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi mereka. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori peran yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah berjalan cukup baik. Masyarakat terlibat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan dan juga secara fisik turut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Meskipun begitu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan, seperti tingkat kesadaran masyarakat, pendidikan, sikap mental, dan aspek ekonomi masyarakat. Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, peneliti dapat memperoleh wawasan yang berharga dan tambahan informasi yang mendukung analisis dalam penelitian mereka saat ini.

2. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian Anda adalah penelitian yang berjudul "Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara)," yang dilakukan oleh Firmansyah pada tahun 2019. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menggali data dan informasi terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Dandang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Dandang dianggap sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembinaan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, serta melaksanakan kegiatan musrembang yang melibatkan partisipasi masyarakat desa. Referensi ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna untuk mendukung penelitian Anda, terutama jika Anda ingin memahami bagaimana pemerintah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam dan nilai-nilai lokal dalam konteks desa atau daerah tertentu.
3. Penelitian lain yang relevan dengan topik Anda adalah penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat," yang dilakukan oleh Siagian pada tahun 2020. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali informasi tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa di Desa Parsoburan Barat dalam memainkan peran sebagai inovator, motivator, dan fasilitator dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat telah berjalan dengan baik. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang menjadi penghambat

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Parsoburan, termasuk aspek ekonomi, pendidikan, dan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa. Referensi ini dapat digunakan sebagai sumber pendukung dalam penelitian Anda, terutama jika Anda ingin memahami lebih lanjut tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut.

4. Penelitian lain yang relevan dengan topik Anda adalah penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Generasi Pemuda dalam Pembangunan Infrastruktur Desa," yang dilakukan oleh Pangemanan pada tahun 2018. Dalam penelitian ini, penulis membahas peran pemerintah desa dalam upaya meningkatkan partisipasi generasi pemuda dalam pembangunan infrastruktur desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa masih memiliki tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan pemuda. Referensi ini dapat digunakan sebagai sumber informasi tambahan dalam penelitian Anda, terutama jika Anda ingin mendalami lebih lanjut tantangan dan solusi yang terkait dengan peran pemerintah desa dalam melibatkan generasi pemuda dalam pembangunan infrastruktur desa.

## **2.2 Peranan Pemerintah Desa**

### **2.2.1 Pengertian Peranan**

Peranan merujuk pada rangkaian perilaku yang teratur yang muncul karena jabatan tertentu atau posisi seseorang dalam masyarakat. Kepribadian individu juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menjalankan peranannya. Peran muncul karena kesadaran bahwa individu bekerja dan hidup dalam interaksi dengan lingkungan yang

beragam. Meskipun setiap individu memiliki lingkungan yang berbeda-beda, peran yang harus dijalankan secara dasarnya seragam. \

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yang berarti bahwa ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang melaksanakan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah konsep yang digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk memahami bagaimana keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Tanpa peran, kedudukan tidak akan memiliki makna, dan sebaliknya, tanpa kedudukan, peran tidak akan ada. Setiap individu memiliki berbagai macam peran yang berkaitan dengan pola interaksi dalam kehidupan mereka. Ini berarti bahwa peran seseorang memengaruhi apa yang mereka lakukan dalam masyarakat dan juga kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. Pemahaman tentang peran bisa diuraikan dalam tiga hal utama:

1. Peran mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam arti ini, peran adalah seperangkat aturan yang memandu perilaku seseorang dalam kehidupan sosial.
2. Ini adalah konsep tentang apa yang individu peroleh dari lingkungan mereka sebagai bagian dari organisasi sosial.
3. Peran juga bisa dianggap sebagai perilaku individu yang memiliki dampak penting terhadap struktur sosial masyarakat.

Referensi yang Anda berikan berasal dari Soekanto (2012) dan menjelaskan pentingnya pemahaman peran dalam masyarakat. Pemahaman tentang peran ini membantu kita memahami bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat dan bagaimana peran mereka memengaruhi struktur sosial.

### 2.2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah badan lokal yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan di masyarakat desa. Sistem pemerintahan desa ini dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam era modern, pemerintah desa adalah bagian dari struktur pemerintahan yang mengelola sumber daya publik, termasuk pengumpulan pajak dari penduduk. Institusi ini jauh lebih kompleks daripada sekadar aspek politik dan ekonomi, dan desa adalah entitas hukum yang memiliki susunan unik, yang didasarkan pada prinsip hak asal usul yang istimewa.

Lembaga musyawarah desa adalah tempat di mana pemuka masyarakat desa berkumpul untuk melakukan musyawarah atau mufakat dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan perkembangan di dalam masyarakat desa tersebut. Cara ini berbeda dengan cara menggerakkan masyarakat di perkotaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa, dan peraturan lainnya, mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah desa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan desa dan mengurus urusan masyarakat setempat. Peran dan tanggung jawab pemerintah desa sangat penting dalam mengelola urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat desa. Mereka berperan dalam menjalankan roda pemerintahan, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan di desa mereka.

Sebagai elemen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam tiga bidang utama: pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Fungsi-fungsi pemerintah desa ini mencakup:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa: Ini mencakup pengaturan dan pengelolaan segala aspek yang

terkait dengan administrasi dan tata pemerintahan di tingkat desa.

2. Melaksanakan pembangunan: Pemerintah desa bertanggung jawab untuk merencanakan, mengawasi, dan mengelola program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat: Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
4. Melaksanakan ketentraman dan keterlibatan masyarakat: Pemerintah desa harus menciptakan lingkungan yang aman dan damai di desa mereka, serta mempromosikan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

Fungsi-fungsi ini secara keseluruhan membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat desa menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang penting sebagai mitra pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur fungsi BPD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 lebih lanjut menguraikan wewenang dan peran BPD dalam pemerintahan desa. Berikut adalah peran dan wewenang BPD menurut peraturan tersebut:

1. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa: BPD memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan di tingkat desa, bekerja sama dengan kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat: BPD berfungsi sebagai wadah untuk menerima masukan dan aspirasi dari warga desa. Mereka kemudian

- mengkomunikasikan aspirasi ini kepada pemerintah desa.
3. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa: BPD terlibat dalam proses perumusan dan perubahan peraturan-peraturan desa dengan kepala desa.
  4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa: BPD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi agar peraturan desa dan kebijakan kepala desa dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan aturan.
  5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa: BPD dapat memberikan masukan dan usulan terkait dengan pengangkatan atau pemberhentian kepala desa kepada pihak yang berwenang.
  6. Membentuk panitia pemilihan kepala desa: BPD terlibat dalam proses pemilihan kepala desa dengan membentuk panitia pemilihan dan mengawasi jalannya proses pemilihan.
  7. Menggali dan merumuskan aspirasi masyarakat: BPD berperan dalam mendengarkan dan mengidentifikasi aspirasi serta kebutuhan masyarakat desa untuk kemudian membantu merumuskan program-program yang relevan.

Pemerintah desa, pada tingkat nasional, juga memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Perannya meliputi:

1. Peran sebagai stabilitator: Pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan budaya serta mewujudkan perubahan yang mendukung pembangunan.
2. Peran sebagai inovator: Pemerintah harus mendorong inovasi dalam metode dan prosedur administrasi pembangunan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
3. Peran selaku pelopor: Pemerintah harus menjadi contoh dalam menerapkan inovasi dan perubahan dalam administrasi pemerintahan.

4. Peran selaku pelaksana sendiri: Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang mungkin tidak dapat dilaksanakan oleh sektor swasta, berdasarkan pertimbangan keamanan, keterbatasan sumber daya, dan kewajiban konstitusional.

Semua peran ini penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan nasional..(Sondang P. Siagian, 2003)

### 2.2.3 Peran Kepala Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 ayat 3 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa. Peran Kepala Desa tidak hanya mencakup aspek pelaksanaan pemerintahan desa, tetapi juga termasuk dalam pembinaan partisipasi masyarakat, menjaga ketertiban, serta memastikan pemulihan dan rekonsiliasi dalam kasus pelanggaran hukum. Sebagai pemimpin dari organisasi pemerintahan desa, perannya adalah strategis dan melibatkan berbagai tanggung jawab yang luas, yang berfokus pada tingkat desa.

Sistem pemerintahan daerah telah dikembangkan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip otonomi (desentralisasi) dan pemantauan. Prinsip dekosentrasi hanya diterapkan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mungkin belum siap atau belum sepenuhnya menerapkan prinsip otonomi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki berbagai tugas dan kewajiban yang mencakup, antara lain:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa: Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa.
2. Membina kehidupan masyarakat desa: Kepala Desa

berperan dalam membimbing dan memajukan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat desa.

3. Membina perekonomian desa: Kepala Desa terlibat dalam pengembangan dan pembinaan ekonomi di desa, termasuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa: Kepala Desa memiliki peran penting dalam menjaga agar desa tetap aman, damai, dan teratur.
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa: Jika terjadi perselisihan di antara anggota masyarakat desa, Kepala Desa dapat memediasi dan mencari solusi damai.
6. Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya: Kepala Desa memiliki wewenang hukum untuk mewakili desa di berbagai proses hukum dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk keperluan tersebut.
7. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkannya sebagai peraturan desa: Kepala Desa berperan dalam merumuskan peraturan-peraturan desa dan berkolaborasi dengan BPD untuk menetapkannya sebagai peraturan desa.

Ini adalah tanggung jawab-tanggung jawab penting yang harus diemban oleh seorang Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Widjaja, 2003)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seorang Kepala Desa memiliki kewajiban yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa tersebut. Ini mencakup berbagai tugas dan kewajiban yang diemban oleh Kepala Desa untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan dengan baik dan masyarakat desa dapat memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Tanggung jawab ini

mencakup berbagai aspek, seperti administrasi desa, pembangunan infrastruktur, pembinaan sosial, dan lainnya. (Sadu Wasistiono, 2006). Pelaksana tugas seorang kepala desa memiliki kewenangan untuk memimpin pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mereka dapat mengusulkan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD, merancang peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk diajukan dan disetujui bersama BPD, mengawasi perkembangan masyarakat desa, mendukung perkembangan ekonomi desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa dalam dan di luar pengadilan, dan, jika diperlukan, menunjuk kuasa hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**

### **2.3.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Intervensi adalah peran serta masyarakat yang terlibat dalam program pembangunan di desa. Milik komunitas adalah partisipasi dan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan di komunitas setempat. "Berpartisipasi dalam masyarakat dan pembangunan berarti mengukur kesiapan masyarakat untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan." Dalam prinsipnya, Pasal 1 ayat 1 Resmi Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah menyatakan bahwa "partisipasi masyarakat lokal dalam pemerintahan daerah adalah bagian dari partisipasi masyarakat yang mengacu pada partisipasi masyarakat untuk menyatakan keinginan, gagasan, dan kepentingan mereka dalam pelaksanaan pemerintahan daerah."(Peraturan pemerintah Nomer 45 pasal 1 ayat 1 Tahun 2017)

Memahami peran ekosistem dan pentingnya menjaga keseimbangannya adalah hal yang krusial dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat. Ini mencakup perubahan lingkungan alam, seperti penggunaan sumber daya alam, serta dampaknya pada masyarakat, seperti kesejahteraan dan kualitas hidup. Dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kedua faktor ini, pembangunan dapat diarahkan untuk mencapai perubahan positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu, konsep ini juga menggarisbawahi pentingnya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan alam serta menjaga keseimbangan ekosistem sangat penting agar sumber daya alam tersebut dapat digunakan oleh generasi saat ini dan masa depan.

Perubahan dalam keseimbangan antara manusia dan lingkungan dapat menyebabkan dampak negatif yang beragam. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan pengawasan yang ketat guna mencegah dampak negatif ini berkembang secara tidak terkendali. Pengawasan ini harus diarahkan pada aspek-aspek pembangunan yang berpotensi menyebabkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan alam dan sosial. Dengan demikian, sumber daya alam dan kemampuan masyarakat dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan dapat mendukung kelangsungan proses pembangunan yang berkelanjutan dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya.

Pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan daerah harus tercermin dan diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, para pemimpin di setiap daerah harus memperpanjang masyarakat dalam mengawasi pembangunan daerah tersebut. Dengan memastikan keseimbangan antara lingkungan dan manusia dalam pembangunan, akan menciptakan masyarakat yang lebih bersedia berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pembangunan adalah kata

kunci dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan warganya, yang sering kali diukur dengan kemajuan materi.

Pentingnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pembangunan membawa konsep pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar atau mencegah kemiskinan, tetapi juga tentang pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan. Ini mencakup pengintegrasian konsep pembangunan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan.

Semua orang harus memiliki peluang untuk berkontribusi dan dihormati dalam semua dimensi pembangunan yang terkait. Pemberdayaan masyarakat adalah paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusatnya dan berusaha untuk mencapai keberlanjutan. Ini terlihat dalam berbagai pendekatan pembangunan. Kepala desa sebagai pemimpin desa memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan dengan memobilisasi partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah paradigma pembangunan yang sangat relevan dalam mengembangkan sumber daya manusia di suatu daerah. Untuk mencapai partisipasi masyarakat yang optimal, pemerintah perlu berinvestasi dalam mengembangkan kapasitas masyarakatnya.

Dengan dukungan partisipasi masyarakat, pelaksanaan pembangunan akan menjadi lebih sukses. Salah satu metode yang efektif untuk menggalakkan partisipasi masyarakat adalah melalui pembentukan organisasi yang dapat mengkoordinasikan dan mengelola beragam kegiatan pembangunan. Ketika masyarakat desa secara aktif terlibat dalam berbagai aspek pembangunan, hasil yang diperoleh akan jauh lebih positif dibandingkan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat.

Masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi daerah mereka dan tahu persis apa yang dibutuhkan dan masalah

apa yang dihadapi oleh lingkungan mereka. Pembangunan yang direncanakan dengan partisipasi masyarakat biasanya lebih berhasil dan dapat mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul selama pelaksanaan.

#### 2.1.1. Peran Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah desa sebagai pemimpin dalam pelaksanaan pembangunan memiliki tanggung jawab terhadap perubahan, baik perubahan di dalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kepala pemerintahan desa harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional dalam menghadapi perubahan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Keputusan yang diambil juga harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tanpa memberatkan mereka. Selain itu, pemerintah desa juga harus memainkan peran yang efektif dalam memberikan wadah untuk melaksanakan perubahan dalam setiap program pembangunan desa, sehingga dapat mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

#### 2.1.2. Pembinaan Terhadap Masyarakat

##### a. Pembinaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi

Peran dan proses pemerintahan desa masih menjadi yang paling berpengaruh dalam merencanakan dan melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran serta keterampilan teknis warga desa dalam memajukan desa. Teori-teori beragam menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi aktif warga desa memiliki peran sentral dalam keberhasilan mereka. Meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pembangunan sebagai alat untuk meningkatkan situasi sosial dan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan merupakan hal yang sangat krusial.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa masih memiliki peran yang signifikan dalam membimbing, merancang, dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga desa tentang proses pembangunan

dan bagaimana mereka dapat berkontribusi. Kesadaran ini dapat mencakup pemahaman tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi desa, sumber daya yang tersedia, dan cara-cara untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

b. Pembinaan Masyarakat Desa Pada Bidang Kesehatan

Pembinaan ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesehatan baik secara fisik maupun mental, dan memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan mereka.

2.3.2 Kemampuan Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

Pemerintah desa, khususnya kepala desa, memiliki peran yang sangat signifikan sebagai administrator dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan, terutama dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di tingkat desa. Kepala desa bersama dengan pemerintah desa lainnya diharapkan memiliki kemampuan untuk menggalang partisipasi masyarakat guna mendukung keberhasilan proses pembangunan melalui implementasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil atau direalisasikan.

2.3.3 Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Selaku Pemerintahan Desa.

Kepala desa, sebagai pemerintah di tingkat desa, memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa upayanya tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan memperhatikannya dengan seksama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Kepala desa harus memproses pelaksanaan program-program pembangunan Untuk mengakselerasi pembangunan desa dengan mempertimbangkan potensi dan masalahnya, program utama yang menjadi pengaruh utama dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan desa harus mencakup:

1. Program pembangunan sumber daya manusia (SDM).
2. Program penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan

bersih.

3. Program pembangunan lingkungan hidup.
4. Keterbukaan dan transparansi dalam kebijakan pembangunan.
5. Kerja sama yang lebih baik antara pemerintah desa dan seluruh komponen masyarakat.
6. Motivasi masyarakat untuk merawat hasil pembangunan yang ada.

Untuk mencapai tingkat pembangunan desa yang optimal, kepala desa perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pembangunan, seperti:

1. Memperkuat dan memberdayakan fungsi pengawasan oleh pihak yang berwenang.
2. Melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dan sedang dilaksanakan.
3. Melakukan monitoring secara berkala.
4. Meningkatkan kualitas kebijakan yang diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat.
5. Menyesuaikan program-program dengan perkembangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

#### 2.3.4 Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

Kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Namun, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam konteks ini. Beberapa kendala tersebut meliputi:

1. **Tingkat Kesadaran Masyarakat:** Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pembangunan ekonomi bisa menjadi kendala. Jika masyarakat tidak menyadari manfaat yang dapat diperoleh dari partisipasi aktif dalam program-program pembangunan, mereka mungkin kurang termotivasi

untuk terlibat.

2. **Tingkat Pendidikan Masyarakat:** Tingkat pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah mungkin menghadapi kendala dalam memahami program-program pembangunan atau berkontribusi dengan efektif.
3. **Sikap dan Mental Masyarakat:** Sikap dan mental masyarakat juga dapat menjadi kendala. Jika masyarakat memiliki sikap yang skeptis terhadap pemerintah desa atau kurang percaya pada keberhasilan program-program pembangunan, mereka mungkin enggan untuk berpartisipasi.

Pemerintah desa perlu mengatasi kendala-kendala ini dengan berbagai cara, termasuk melakukan kampanye penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menyediakan pelatihan atau pendidikan bagi warga desa yang kurang terdidik, dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan motivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.